



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Arteri Supadio Komplek Ruko Vila Ceria Lestaei No.33 Kode Pos 78391

**SUNGAI RAYA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR : 015/KESBANGPOL-A/2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peratuaran daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46);
10. Daerah Bupati Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020;
11. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya untuk rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran penetapan kinerja, laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa:
- a. biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2020.
  - b. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya

pada tanggal 2020

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN KUBU RAYA,



TCH. LAYDIANTO

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya.

Nomor : 015 Tahun 2020  
Tanggal : 21 Februari 2020  
Tentang : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya Nomor : 015/ Bankesbangpol-A/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Unit SOPD : **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya**
2. Tugas dan Fungsi :
  - Tugas : Merumuskan dan Melaksanakan Kebijakan dan Standarisasi Teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri.
  - Fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;  
2. Pelaksanaan kebijan di bidang kesatuan bangsa dan politik;  
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan keteria di bidang kesatuan bangsa dan politik;  
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesatuan bangsa dan politik;  
5. Pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;  
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi;

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
IKU RPJMD				
1.	Meningkatnya Kerukuna dan Keharmonisan Kehidupan Masyarakat.	Angka Konflik Sara	Jumlah Konflik Sra yang terjadi pada tahun n.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
IKU SOPD				
1.	Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan hidup rukun dan damai.	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Pembauran serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi terhadap masyarakat.	Realisasi Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan tahun n) / (Target Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan tahun n)) x 100%.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :  • Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama
2.	Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik.	Angka Konflik Sosial	Semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin rendah :  (((2 x Target) – Realisasi) / Target] x 100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :  • Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
3.	Meningkatkan peran aktif, penguatan dan pemberdayaan Masyarakat, Ormas/LSM dan Parpol dalam mewujudkan stabilitas kehidupan masyarakat yang berdemokrasi.	Persentase Pembinaan Politik Daerah.	$\frac{\text{Realisasi Kegiatan yang dilaksanakan tahun } n}{\text{Target Kegiatan yang dilaksanakan tahun } n}} \times 100\%$ .	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :  • Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
4.	Meningkatnya Kinerja, Pelayanan dan Kapasitas aparatur.	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	$\frac{\text{Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek tahun } n}{\text{Target Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek/Pelatihan tahun } n}} \times 100\%$ .	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :  • Sekretariat Badan

Pihak Kedua,

BUPATI KABUPATEN KUBU RAYA

H. Muda Mahendrawan

Sungai Raya, 21 Februari 2020

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KUBU RAYA

TH. C. Leydianto, S.IP. M.Si.  
Pembina Utama Madya (IV/c)  
NIP. 196306231985031010

INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON III

1.

Unit SOPD

:

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
2.

Tugas dan Fungsi

:

• Tugas

:

Menyiapkan perumusan pelaksanaan kebijakan mediasi dan fungsi hubungan dengan dan antar lembaga politik dan dengan antara organisasi kemasyarakata/lembaga kemasyarakatan.

• Fungsi

:

1. Penyiapan, Perumusan kerjasama dengan lembaga Legislatif;

2. Penyiapan, perumusan kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu;

3. Penyiapan, perumusan kerjasama dengan lembaga politik, tokoh/elit politik, toko masyarakat, tokoh adat tokoh agama;

4. Penyiapan perumusan pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan bidang politik;

5. Penyiapan perumusan pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan bidang politik;

6. Penyiapan perumusan kebijakan dan pengkajian masalah dibidang politik;

7. Penyiapan perumusan dan pengkajian masalah di bidang organisasi masyarakat;

8. Pemberdayaan infra dan supra sruktur politik dan organisasi masyarakat dalam rangka peningkatan ketahanan bangsa dan perkokoh kesatuan bangsa;

9. Penyiapan, perumusan mediasi dan fasilitasi infra dan supra struktur politik dan organisasi masyarakat yang berharkat dan berbudaya.

10. Perumusan, penyiapan kebijakan dan pelaksanaan pendidikan dan pembinaan budaya politik.

11. Pengevaluasian dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang politik dan kemasyarakatan.

12. Pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.

13. Pembinaan Ormas dan LSM;
- | No. | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA SASARAN PRONGRAM                   | CARA PENGHITUNGAN   | SUMBER DATA  |
|-----|---|--|---|--|
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5  |
| 1.  | Terlaksananya pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik daerah. | Laporan Perkembangan Politik Daerah                  | Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun dalam setahun.                       | Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan  |
| 2.  | Terlaksananya Fasilitasi bantuan keuangan partai politik.                     | Jumlah Parpol yang menerima Bantuan Keuangan Parpol. | Jumlah Parpol yang menerima Bantuan Keuangan Parpol dari Pemerintah Daerah. | Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan. |
| 3.  | Terlaksananya pembinaan kepada pengurus partai politik                        | Jumlah Peserta Pembinaan Partai Politik              | Jumlah pengurus Parpol yang dibina  | Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan. |

4.	Terlaksananya perizinan reklame Non Komersil	Jumlah Surat ijin pemasangan reklame non komersil	Jumlah Surat ijin pemasangan reklame non komersil di tahun n	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
5.	Tersedianya data base Ormas/LSM	Jumlah Ormas/LSM yang ber SKT dari Badan Kesbangpol	Jumlah Ormas/LSM yang ber SKT tahun n	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama

Sungai Raya, 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Kubu Raya

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi  
Kemasyarakatan

TH.C. LEYDIANTO, S.IP, M.Si.  
NIP. 196306231985031010

DRS. DARUSSALAM  
NIP. 196609131994031005

## INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON IV

1. Unit SOPD : Sub Bidang Politik Dalam Negeri
2. Tugas dan Fungsi :
- Tugas : Mengumpulkan dan menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan bidang Politik Dalam Negeri.
  - Fungsi :
    1. Penyiapan, perumusan kerjasama dengan lembaga politik;
    2. Penyiapan, perumusan kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu;
    3. Penyiapan, Perumusan kerjasama dengan lembaga Legislatif;
    4. Penyampaian dan pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang politik;
    5. Penyiapan dan pelaksanaan mediasi dan fasilitasi hubungan dengan antar infra dan supra struktur politik;
    6. Penyampaian, pengumpulan baha-bahan perumusan kebijakan dan pengkajian masalah politik;
    7. Penyampaian bahan rumusan kebijakan, penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu;
    8. Pelaksanaan kegiatan pendukung sukses pemilu;
    9. Pelaksanaan pendidikan dan pembinaan politik;
    10. Pelaksanaan pendidikan dan pembinaan budaya politik;
    11. Pembinaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas;

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN PRONGRAM	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik daerah.	Laporan Perkembangan Politik Daerah	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun dalam setahun.	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
2.	Terlaksananya Fasilitasi bantuan keuangan partai politik.	Jumlah Parpol yang menerima Bantuan Keuangan Parpol.	Jumlah Parpol yang menerima Bantuan Keuangan Parpol dari Pemerintah Daerah.	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
3.	Terlaksananya pembinaan kepada pengurus partai politik	Jumlah Peserta Pembinaan Partai Politik	Jumlah pengurus Parpol yang dibina	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
4.	Terlaksananya perizinan reklame Non Komersil	Jumlah Surat ijin pemasangan reklame non komersil	Jumlah Surat ijin pemasangan reklame non komersil di tahun n	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Sungai Raya, 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan  
Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi,  
Sosial, Budaya, dan Agama

Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri

Drs. Darssalam  
NIP. 196609131994031005

Dwi Didi Gunawan, S.Pd, M.Si.  
NIP. 198010282010011013

**INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON IV**

1. Unit SOPD : Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
2. Tugas dan Fungsi :
  - Tugas : Mengumpulkan dan menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan bidang Politik Dalam Negeri.
  - Fungsi : 1. Penyiapan, perumusan kerjasama dengan lembaga politik;

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN PRONGRAM	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya data base Ormas/LSM	Jumlah Ormas/LSM yang ber SKT dari Badan Kesbangpol	Jumlah Ormas/LSM yang ber SKT tahun n	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan  
Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi,  
Sosial, Budaya, dan Agama

Drs. Darssalam  
NIP. 196609131994031005

Sungai Raya, 2020

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri

Budi Aminuddin, S.Sos.  
NIP. 198303222010011012

INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON III

1.

Unit SOPD

:

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama
2.

Tugas dan Fungsi

:

• Tugas

:

Menyiapkan perumusan pelaksanaan kebijakan mediasi dan fungsi pelaksanaan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

• Fungsi

:

1. Penyiapan Perumusan Mediasi dan Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB;

2.

3. Penyiapan Perumusan Mediasi dan Fasilitasi Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan FPK;

4. Penyiapan Perumusan Kebijakan Imlementasi Penyuluhan Bela Negara;

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN PRONGRAM	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya pembinaan Kepada Masyarakat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kubu Raya.	Jumlah Peserta Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB	Jumlah peserta penyuluhan tahun n	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama
2.	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan kepada Masyarakat dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Kubu Raya.	Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah Peserta Kegiatan Tahun n	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama
3.	Terlaksananya Imlementasi Penyuluhan Bela Negara di Kabupaten Kubu Raya.	Kegiatan Sosialisasi /Penyuluhan Bela Negara	Jumlah Peserta Kegiatan Tahun n	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama

Sungai Raya,

Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Kubu Raya

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan  
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama

TH.C. LEYDIANTO, S.IP, M.Si.

NIP. 196306231985031010

NUR AHMAD PRAMUDI, SE. ME.

NIP. 19660506199503005

INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON IV

1. Unit SOPD : Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
2. Tugas dan Fungsi :
  - Tugas : Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan pemantapan wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa.
  - Fungsi :

1. Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan pemantapan wawasan kebangsaan;

2. Penyiapan dan pelaksanaan kebijakan pembauran suku dan etnis;

3. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan wawasan kebangsaan;

4. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan segenap unsur masyarakat dalam rangka pelaksanaan wawasan kebangsaan;

5. Pembinaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi;

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN PRONGRAM	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan kepada Masyarakat dan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Kubu Raya.	Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah Peserta Kegiatan Tahun n	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama
2.	Terlaksananya Imlementasi Penyuluhan Bela Negara di Kabupaten Kubu Raya.	Kegiatan Sosialisasi /Penyuluhan Bela Negara	Jumlah Peserta Kegiatan Tahun n	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama

Sungai Raya, Januari 2020

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama

NUR AHMAD PRAMUDI, SE. ME.  
NIP. 19660506199503005

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

SYARIF HERI, SE  
NIP. 19650105 198603 1 002

## INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON IV

1. Unit SOPD : **Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama**
2. Tugas dan Fungsi :
  - Tugas : Mengumpulkan dan menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama.
  - Fungsi :
    12. Perencanaan Program kerja yang berkaitan dengan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama;
    13. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama;
    14. Pemberian pelayanan administrasi bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama;
    15. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama;
    16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugas;

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN PRONGRAM	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya pembinaan Kepada Masyarakat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kubu Raya.	Jumlah Peserta Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB	Jumlah peserta penyuluhan tahun n	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama

Sungai Raya, Januari 2020

**Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama,**

**Kepala Bidang Ideologi, Wawasan  
Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi,  
Sosial, Budaya, dan Agama**

**Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,  
Budaya, dan Agama**

**NUR AHMAD PRAMUDI, SE. ME.**  
**NIP. 19660506199503005**

**JENTRIT, SE**  
NIP. 196902251198022001

INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON III

1. Unit SOPD : Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
2. Tugas dan Fungsi :

Tugas : Mengumpulkan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik, pengawasan orang asing, kewaspadaan dini, P4GN (pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran Gelap Narkoba) dan Gerakan Revolusi Mental.

Fungsi :

1. Penyiapan rumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik;

2. Penyiapan rumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing;

3. Penyiapan rumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan deteksi dini;

4. Penyiapan rumusan mediasi dan fasilitasi kerjasama intelkam;

5. Penyiapan rumusan kerjasama dengan lembaga, instansi terkait dan segenap unsur masyarakat dalam rangka P4GN (pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran Gelap Narkoba);

6. Penyiapan rumusan mediasi dan fasilitasi Gerakan Revolusi Mental;

7. Penyiapan rumusan kebijakan dan pengkajian masalah strategis daerah;

8. Penyiapan rumusan kerjasama dengan lembaga, instansi terkait dan segenap unsur masyarakat dalam rangka penanganan konflik;

9. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaksanaan tugas pokok;
- | No. | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA SASARAN PRONGRAM  | CARA PENGHITUNGAN  | SUMBER DATA  |
|-----|---|---|--|--|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5  |
| 1.  | Meningkatnya kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam menciptakan forum kewaspadaan dini guna terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan di daerah. | Meningkatnya kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam menciptakan forum kewaspadaan dini guna terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan di daerah. | {{(Realisasi Jumlah Kegiatan Prongram Kewaspadaan, Keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan) / (Jumlah Target)}}x 100% | Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik |
| 2.  | Terlaksananya penyuluhan P4GN (pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran Gelap Narkoba) kepada masyarakat.  | Jumlah Peserta penyuluhan P4GN (pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran Gelap Narkoba)  | Jumlah masyarakat yang diberi penyuluhan   | Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik |
| 3.  | Terlaksananya Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam penanganan konflik sosial   | Angka Konflik Sosial  | Jumlah Konflik Sosial yang ditangani tahun n   | Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik |

4.	Terlaksananya pembinaan dan pemantauan orang asing di daerah	Jumlah Warga Orang Asing yang berada di Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Orang Asing yang terdata pada tahun n	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
5.	Terlaksananya Penyuluhan Imlementasi Gerakan Revolusi Mental	Jumlah Peserta penyuluhan Imlementasi Gerakan Revolusi Mental	{(Realisasi Jumlah Kegiatan Imlementasi Gerakan Revolusi Mental yang dilaksanakan) / (Jumlah Target)}x 100%	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Sungai Raya, 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik      Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan  
Kabupaten Kubu Raya      Konflik

TH.C. LEYDIANTO, S.IP, M.Si.      Drs. RIKSON SIREGAR, M.Si.  
NIP. 196306231985031010      NIP. 196810011994031006

INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON IV

1. Unit SOPD : Sub Bidang Kewaspadaan Nasional
2. Tugas dan Fungsi :

Tugas

Mengumpulkan dan menyampaikan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan Fasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi FKDM, Pemantauan Orang Asing, dan Imlementasi Gerakan Revolusi Mental.

Fungsi

6. Penyiapan rumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan deteksi dini;

7. Penyiapan rumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing;

8. Penyiapan rumusan kebijakan dan pengkajian masalah strategis daerah;

9. Pembinaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi;

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN PRONGRAM	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam menciptakan forum kewaspadaan dini guna terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan di daerah.	Meningkatnya kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam menciptakan forum kewaspadaan dini guna terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan di daerah.	{(Realisasi Jumlah Kegiatan Prongram Kewaspadaan, Keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan) / (Jumlah Target)}x 100%	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
2.	Terlaksananya pembinaan dan pemantauan orang asing di daerah	Jumlah Warga Orang Asing yang berada di Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Orang Asing yang terdata pada tahun n	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
3.	Terlaksananya Penyuluhan Imlementasi Gerakan Revolusi Mental	Jumlah Peserta penyuluhan Imlementasi Gerakan Revolusi Mental	{(Realisasi Jumlah Kegiatan Imlementasi Gerakan Revolusi Mental yang dilaksanakan) / (Jumlah Target)}x 100%	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pihak Kedua,

Sungai Raya,

2020

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Drs. RIKSON SIREGAR, M.Si.  
NIP. 196810011994031006

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional

MUKHTAR  
NIP. 196311041986031014

**INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON IV**

1. Unit SOPD : Sub Bidang Penanganan Konflik
2. Tugas dan Fungsi :

Tugas : Mengumpulkan dan menyampaikan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik, dan P4GN (pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran Gelap Narkoba).

Fungsi :

1. Penyiapan rumusan kerjasama dengan lembaga, instansi terkait dan segenap unsur masyarakat dalam rangka P4GN (pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran Gelap Narkoba);

2. Penyiapan rumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik;

3. Pembinaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi;

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN PRONGRAM	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya penyuluhan P4GN (pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran Gelap Narkoba) kepada masyarakat.	Jumlah Peserta penyuluhan P4GN (pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran Gelap Narkoba)	Jumlah masyarakat yang diberi penyuluhan	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
2.	Terlaksananya Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam penanganan konflik sosial	Angka Konflik Sosial	Jumlah Konflik Sosial yang ditangani tahun n	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Sungai Raya, 2020

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional

Drs. RIKSON SIREGAR, M.Si.  
NIP. 196810011994031006

ANTONY FIERDA, SH.MH.  
NIP. 196911222003121003

INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON III

1.

Unit SOPD

:

Bidang Renja dan Keuangan, Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum
2.

Tugas dan Fungsi

:

Tugas

:

Merumuskan dalam penyusunan rencana kerja dan keuangan, pengendalian evaluasi, penyusunan pelaporan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, perlengkapan administrasi umum serta rumah tangga Badan.

Fungsi

:

10. Penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas yang didasari perencanaan yang dibuat oleh bidang-bidang;

11. Pelaksanaan pembagian tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya (tupoksi staf)

12. Pendistribusian tugas kepada bawahan dilingkungan sekretariat, sesuai bidang tugas;

13. Pelaksanaan penataan Badan dan menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;

14. Pengoordinasian pembinaan, monitoring evaluasi dan pengawasan serta pelaporan pelaksanaan tugas;

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN PRONGRAM	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya.	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	{(Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek tahun n) / (Target Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek Tahun n)}	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :  • Sekretaris Badan

Pihak Kedua,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Kubu Raya

TH.C. LEYDIANTO, S.IP, M.Si.

NIP. 196306231985031010

Sungai Raya,

2020

Pihak Pertama,

Sekretaris

TUGIONO, SE.

NIP. 196304041982031004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON IV**

1.

Unit SOPD

:

Sub Bidang Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum
2.

Tugas dan Fungsi

:

• Tugas

:

Mengumpulkan dan menyampaikan bahan perumusan kebijakan bidang Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum.

• Fungsi

:

4. Perencanaan dan perumusan prongram kegiatan di Sub Bidang tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;

5. Penyampaian bahan pelaksanaan kebijakan daerah di Sub Bidang tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;

6. Pengorganisasian, pengumpulan dan pegelolaan bahan perumusan perlengkapan dan umum;

7. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di Sub Bidang tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan umum;

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi;

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN PRONGRAM	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya pengembangan dan peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan/Bimtek	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan/Bimtek/Diklat tahun n	Sekretariat Badan Kesbangpol

Pihak Kedua,

Sekretaris

TUGIONO, SE.

NIP. 196304041982031004

Sungai Raya,

2020

Pihak Pertama,

Sub Bidang Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum

TATI, S.Sos, M.Ap.

NIP. 198105122009031014

**INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON IV**

1. Unit SOPD : Sub Bagian Renja dan Keuangan
2. Tugas dan Fungsi :

• Tugas : Mengumpulkan dan menyampaikan bahan perumusan kebijakan bidang Ketahanan Sosial.

• Fungsi :

9. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;

10. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang rencana kerja dan keuangan;

11. Pengorganisasian, pengumpulan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan pembinaan penyelenggaraan tugas rencana kerja dan keuangan;

12. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang rencana kerja dan keuangan;

13. Penyiapan bahan pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang rencana kerja dan keuangan;

14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi;

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN PRONGRAM	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananyabahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (RENJA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA.	Jumlah angaaran yang disusun sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Jumlah Anggaran di tahun n	Sekretariat Badan Kesbangpol

Sungai Raya, 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Sekretaris

Sub Bagian Renja dan Keuangan

TUGIONO, SE.

SYAPARUDIN, S.Sos.

**NIP. 196304041982031004**

**NIP. 198110212000121002**